

Pengelolaan Sumber Daya Sungai Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Keberlanjutan Masyarakat Pulau Kemaro

Nabila Tahira¹.

¹. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
E-mail: nabila_tahira@fisip.unsri.ac.id (CA)

Abstrak: Pulau Kemaro merupakan kawasan sungai yang memiliki fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat. Namun, perubahan kualitas lingkungan, keterbatasan air bersih, kerentanan infrastruktur, serta belum optimalnya koordinasi antarpemangku kepentingan memengaruhi keberlanjutan kehidupan warga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan sumber daya sungai berbasis masyarakat melalui teori modal sosial Robert Putnam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan pelaku penyelaman artefak, serta dokumentasi kondisi sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki modal sosial berupa kepercayaan, norma timbal balik, jaringan kerja, pengetahuan lokal, dan solidaritas. Modal sosial tersebut mendukung pembagian wilayah kerja, pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya sungai, dan respons kolektif terhadap masalah lingkungan. Namun, modal sosial belum sepenuhnya terhubung dengan kelembagaan formal. Penelitian merekomendasikan pembentukan forum pengelolaan sungai berbasis komunitas, penguatan kemitraan lintas pihak, peningkatan keselamatan kerja, penyediaan air bersih, dan pengembangan pelestarian artefak secara legal serta edukatif.

Kata Kunci: Modal Sosial, Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Jaringan, Keberlanjutan, Norma, Tepian Sungai.

Sitasi: Tahira, N. (2026). Pengelolaan Sumber Daya Sungai Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Keberlanjutan Masyarakat Pulau Kemaro. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(8), 1103–1112. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i8.1155>

1. Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat telah menjadi paradigma dalam menghadapi kompleksitas tantangan lingkungan kontemporer. Sungai, sebagai salah satu sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia, memerlukan pendekatan pengelolaan yang tidak hanya mengandalkan mekanisme teknis dan birokratis, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal yang memiliki kedekatan langsung dengan ekosistem sungai. Pulau Kemaro, yang terletak di tengah aliran Sungai Musi,

Sumatera Selatan, merupakan salah satu lokasi yang menarik untuk dikaji dalam konteks pengelolaan sumber daya sungai berbasis masyarakat.

Sungai tidak hanya berfungsi sebagai bentang alam dan saluran air. Sungai membentuk ruang sosial tempat masyarakat mengembangkan mata pencaharian, identitas, pengetahuan lokal, jaringan ekonomi, dan praktik kebudayaan. Dalam konteks masyarakat tepian Sungai Musi, hubungan antara warga dan sungai berlangsung secara langsung. Sungai menjadi jalur mobilitas, sumber penghidupan, tempat berlangsungnya interaksi sosial, serta bagian dari sejarah kawasan (Atmanto, 2024). Keberlanjutan Pulau Kemaro bergantung pada kemampuan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengelola sumber daya sungai secara kolektif.

Robert Putnam, dalam karya *Making Democracy Work* (1993), mendefinisikan modal sosial sebagai fitur-fitur organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama (Putnam, 2000). Putnam mengidentifikasi tiga elemen utama modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*social networks*), dan norma-norma (*norms of reciprocity*) (Massiri dkk., 2025). Putnam membedakan antara modal sosial yang mengikat (*bonding social capital*) yang bersifat ke dalam dan memperkuat identitas eksklusif kelompok homogen, dengan modal sosial yang menjembatani (*bridging social capital*) yang bersifat keluar dan mencakup orang-orang dari berbagai latar belakang sosial yang beragam.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sekitar Pulau Kemaro yaitu Kampung Air menghadapi beberapa persoalan yang saling berkaitan. Warga mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih, perubahan kualitas air, jalan permukiman yang rentan tergenang saat pasang, pengelolaan sampah yang belum memadai, dan keterbatasan fasilitas keselamatan bagi penyelam artefak. Kondisi tersebut memengaruhi kesehatan, mobilitas, biaya rumah tangga, dan keberlanjutan mata pencaharian. Meskipun demikian, masyarakat tetap mempertahankan kehidupan melalui kerja sama, pengetahuan lokal, hubungan kekerabatan, dan strategi ekonomi yang berkembang dari pengalaman antargenerasi.

Aktivitas pencarian artefak di Sungai Musi memperlihatkan keterkaitan antara sumber daya alam, sejarah, dan ekonomi lokal. Para penyelam mengetahui lokasi, kedalaman, karakter arus, serta ciri benda yang ditemukan. Pengetahuan tersebut tidak sepenuhnya diperoleh melalui pelatihan formal, tetapi diwariskan melalui pengalaman dan hubungan sosial. Masyarakat juga mengenal pembagian wilayah kerja secara tidak tertulis untuk mengurangi konflik. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sungai telah memiliki dasar sosial, meskipun belum dirumuskan sebagai kelembagaan formal yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah.

Pengelolaan sumber daya sungai berbasis masyarakat menempatkan warga sebagai subjek. Pendekatan ini mengakui bahwa masyarakat memiliki pengetahuan, norma, jaringan, dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Pendekatan tersebut berbeda dari model yang hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima bantuan. Pengelolaan berbasis masyarakat menuntut pembagian peran yang jelas antara warga, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas budaya, dan pelaku usaha.

Kajian ini menggunakan teori modal sosial Robert Putnam. Putnam memandang modal sosial sebagai unsur organisasi sosial yang mencakup jaringan, norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi serta kerja sama untuk mencapai manfaat bersama (Putnam, 2000). Dalam penelitian ini, modal sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat membangun kerja sama dalam memanfaatkan sungai, mengatur hubungan antarwarga, mempertahankan pengetahuan lokal, dan merespons masalah lingkungan. Teori tersebut juga membantu menilai keterhubungan masyarakat dengan institusi formal (Pretty, 2003).

Penelitian terdahulu tentang pengelolaan sumber daya umumnya menekankan partisipasi, kelembagaan, dan keberlanjutan (Fatemi dkk., 2021; Panzarella dkk., 2023; Paramitasari dkk., 2023). Namun, kajian yang menghubungkan pengelolaan sungai, aktivitas penyelaman artefak, pengetahuan lokal, dan modal sosial pada masyarakat Pulau Kemaro masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tiga bentuk modal sosial sekaligus, yaitu bonding, bridging, dan linking social capital, dalam konteks pengelolaan sumber daya sungai dan pelestarian potensi budaya bawah air.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana bentuk modal sosial masyarakat dalam pengelolaan sumber daya sungai di Pulau Kemaro? Kedua, bagaimana modal sosial tersebut dapat diperkuat untuk mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya? Penelitian bertujuan menganalisis bentuk, fungsi, keterbatasan, dan strategi penguatan modal sosial dalam pengelolaan sumber daya sungai berbasis Masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji pengalaman masyarakat, praktik sosial, hubungan antarpelaku, serta pemaknaan warga terhadap sumber daya sungai di Pulau Kemaro sebagai konteks sosial yang memiliki keterkaitan ekologis, ekonomi, sejarah, dan budaya. Lokasi penelitian mencakup Pulau Kemaro dan kawasan Kampung Air di tepian Sungai Musi, dengan informan utama berupa tokoh masyarakat dan pelaku pencarian artefak yang memiliki pengalaman panjang dalam memanfaatkan sungai, serta informan

pendukung dari warga yang memahami kondisi air, infrastruktur, mata pencaharian, dan hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi (Creswell & Creswell, 2018). Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman kerja, pengetahuan lokal, aturan tidak tertulis, hubungan sosial, kondisi air, dukungan kelembagaan, dan harapan warga, sedangkan observasi dan dokumentasi digunakan untuk mencatat kondisi permukiman, akses jalan, lingkungan sungai, fasilitas air bersih, aktivitas warga, serta artefak yang ditemukan. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dkk., 2014), dengan pengelompokan tema kepercayaan, norma timbal balik, jaringan sosial, tindakan kolektif, hubungan antarkelompok, dan hubungan dengan institusi. Temuan kemudian dianalisis menggunakan konsep *bonding*, *bridging*, dan *linking social capital*, sementara keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik, perbandingan informasi antarwawancara, dan kesesuaian antara keterangan informan dengan hasil observasi.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Sungai sebagai Ruang Ekologis, Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Bagi masyarakat Pulau Kemaro, sungai merupakan ruang hidup yang memiliki banyak fungsi. Warga menggunakan sungai untuk mobilitas, aktivitas ekonomi, pekerjaan penyelaman, dan interaksi dengan wilayah lain. Sungai juga menyimpan artefak yang berkaitan dengan jalur perdagangan dan sejarah kawasan. Fungsi tersebut menyebabkan perubahan kondisi sungai langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.

Ketergantungan terhadap sungai tidak selalu disertai ketersediaan layanan dasar yang memadai. Warga menyampaikan bahwa air sungai tidak digunakan sebagai air minum. Mereka membeli air kemasan atau memperoleh air dari sumber lain. Biaya untuk memperoleh air bersih menambah beban pengeluaran rumah tangga. Pada saat yang sama, perubahan aliran, sedimentasi, sampah, dan aktivitas di sekitar sungai memengaruhi kenyamanan serta keamanan warga.

Kondisi jalan yang tergenang ketika pasang juga membatasi mobilitas. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat fisik. Genangan dapat menunda kegiatan ekonomi, mengurangi akses terhadap layanan, dan membatasi interaksi sosial. Karena itu, pengelolaan sungai perlu mencakup ekosistem, permukiman, sanitasi, drainase, mobilitas, dan mata pencaharian secara terpadu.

3.2. Kepercayaan sebagai Dasar Kerja Sama Masyarakat

Kepercayaan merupakan unsur utama modal sosial Putnam. Di Pulau Kemaro, kepercayaan tumbuh melalui hubungan yang berlangsung lama, kedekatan tempat

tinggal, pengalaman bersama, dan ketergantungan antarwarga. Dalam pekerjaan penyelaman, kepercayaan memiliki arti praktis karena keselamatan penyelam bergantung pada orang lain yang membantu peralatan, memantau kondisi, atau memberi informasi mengenai lokasi.

Kepercayaan juga terlihat dalam pertukaran informasi mengenai artefak, harga, calon pembeli, dan karakter barang. Informasi tersebut memiliki nilai ekonomi. Namun, warga tetap mengembangkan mekanisme sosial untuk berbagi pengetahuan dengan orang yang dianggap dapat dipercaya. Hubungan ini mengurangi biaya koordinasi karena tidak seluruh kesepakatan harus ditulis secara formal.

Meskipun kuat di tingkat internal, kepercayaan terhadap lembaga formal belum berkembang secara optimal. Sebagian warga menilai bahwa pertemuan, bantuan, atau program belum selalu diikuti perubahan yang nyata. Kondisi tersebut dapat mengurangi linking social capital. Dalam kerangka Putnam, lemahnya hubungan vertikal antara komunitas dan institusi dapat membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya, informasi, perlindungan, dan pengambilan Keputusan.

3.3. Norma Timbal Balik dan Aturan Tidak Tertulis

Masyarakat memiliki aturan tidak tertulis dalam pembagian wilayah kerja dan hubungan antarpelampung. Aturan tersebut berfungsi mengurangi perebutan lokasi dan menjaga hubungan sosial. Norma ini lahir dari kebiasaan, pengalaman, dan kebutuhan untuk mempertahankan ketertiban. Sanksi yang digunakan lebih banyak berbentuk teguran, penilaian sosial, atau pembatasan kepercayaan.

Norma timbal balik juga tampak dalam bantuan antarwarga. Warga saling membantu ketika menerima tamu, menghadapi kebutuhan pekerjaan, atau menyampaikan persoalan lingkungan. Timbal balik tidak selalu berlangsung dalam bentuk uang. Bantuan dapat berupa tenaga, informasi, akses jaringan, atau dukungan sosial. Putnam (2000) menjelaskan bahwa norma timbal balik memperbesar kemungkinan seseorang membantu pihak lain karena terdapat keyakinan bahwa bantuan akan kembali dalam bentuk yang sepadan pada waktu berbeda (Putnam, 2000).

Aturan lokal tersebut menjadi modal awal bagi pengelolaan berbasis masyarakat. Namun, aturan perlu dirumuskan secara partisipatif agar dapat digunakan dalam pengelolaan sungai yang lebih luas. Penguatan tidak berarti menghilangkan karakter lokal. Penguatan dilakukan dengan mendokumentasikan kesepakatan, menetapkan peran, membuat mekanisme pengawasan, dan menghubungkan norma komunitas dengan regulasi formal.

3.4. Jaringan Sosial dan Pengetahuan Lokal

Jaringan sosial masyarakat terbentuk melalui hubungan keluarga, tetangga, sesama penyelam, kolektor, pembeli, mahasiswa, peneliti, dan pihak lain yang berkunjung. Jaringan tersebut berfungsi sebagai saluran informasi dan pertukaran sumber daya. Warga dapat memperluas pemasaran artefak melalui teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan lokal telah terhubung dengan jaringan yang lebih luas.

Pengetahuan lokal menjadi bagian penting dari jaringan sosial. Penyelam memahami arus, kedalaman, lokasi, karakter dasar sungai, dan ciri artefak berdasarkan pengalaman. Pengetahuan ini tersimpan dalam individu dan komunitas. Jika tidak didokumentasikan, pengetahuan tersebut dapat hilang ketika generasi muda tidak lagi menjalankan pekerjaan yang sama.

Pengelolaan berbasis masyarakat perlu memosisikan pengetahuan lokal sebagai sumber informasi yang sah. Pengetahuan lokal dapat dipadukan dengan pengetahuan ilmiah mengenai kualitas air, keselamatan kerja, konservasi, arkeologi bawah air, dan kebencanaan. Integrasi ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi setempat.

3.5. Bonding, Bridging, dan Linking Social Capital

Temuan penelitian dapat dipetakan ke dalam tiga bentuk modal sosial. Pertama, bonding social capital terlihat pada hubungan erat antarwarga, keluarga, dan kelompok penyelam. Hubungan ini menghasilkan solidaritas, rasa aman, bantuan langsung, dan pemeliharaan aturan lokal. Bonding social capital penting saat masyarakat menghadapi kebutuhan mendesak. Namun, ikatan yang terlalu tertutup dapat membatasi masuknya informasi baru atau mempersempit akses terhadap jaringan di luar komunitas.

Kedua, bridging social capital muncul melalui hubungan dengan mahasiswa, peneliti, komunitas budaya, pengunjung, pembeli, dan kelompok lain yang memiliki latar belakang berbeda. Jembatan sosial ini membuka akses terhadap pengetahuan, promosi, dokumentasi, dan peluang kerja sama. Bridging social capital perlu diperluas agar masyarakat tidak hanya bergantung pada jaringan ekonomi informal.

Ketiga, linking social capital berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha, dan institusi yang memiliki kewenangan atau sumber daya. Bentuk modal sosial ini masih perlu diperkuat. Warga membutuhkan jalur komunikasi yang rutin, transparan, dan berorientasi hasil. Forum yang hanya berlangsung sesekali belum cukup untuk membentuk hubungan vertikal yang stabil.

3.6. Pemetaan Modal Sosial dalam Pengelolaan Sungai

Tabel 1. Modal sosial yang ada

Dimensi	Bentuk di Masyarakat	Fungsi	Kebutuhan Penguatan
Kepercayaan	Kepercayaan antarwarga dan sesama penyelam	Mempermudah koordinasi dan pertukaran informasi	Transparansi program dan komunikasi rutin dengan institusi
Norma	Pembagian wilayah kerja dan bantuan timbal balik	Mengurangi konflik dan menjaga ketertiban	Dokumentasi aturan dan penyusunan kesepakatan komunitas
Jaringan	Keluarga, penyelam, pembeli, peneliti, dan pengunjung	Membuka akses informasi dan peluang ekonomi	Kemitraan dengan perguruan tinggi, komunitas budaya, dan pemerintah
Tindakan kolektif	Gotong royong dan penyampaian kebutuhan bersama	Memperkuat respons terhadap masalah lokal	Forum pengelolaan sungai dengan kewenangan dan agenda kerja
Pengetahuan lokal	Pengetahuan arus, lokasi, kedalaman, dan artefak	Mendukung pekerjaan dan identitas budaya	Dokumentasi, pelatihan keselamatan, dan integrasi dengan ilmu pengetahuan

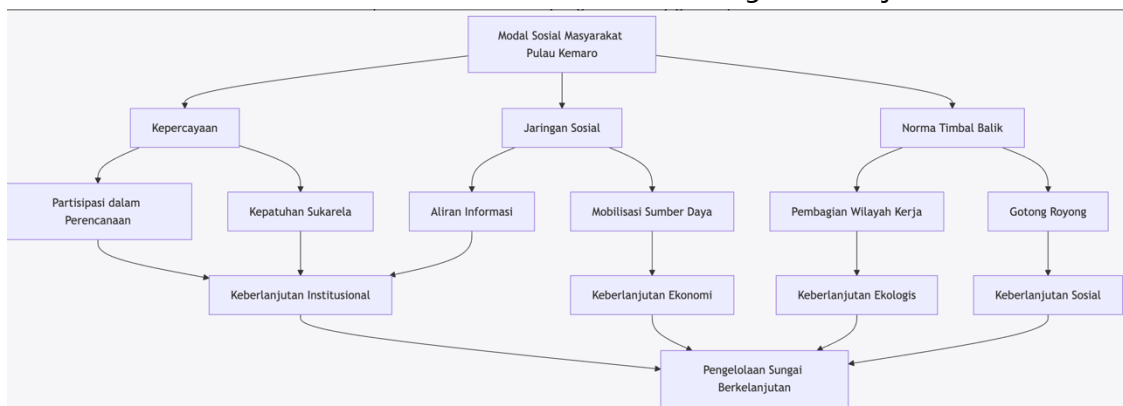
3.7. Modal Sosial dan Keberlanjutan Pulau Kemaro

Keberlanjutan lingkungan memerlukan partisipasi warga dalam pemantauan kualitas air, pengurangan sampah, perlindungan tepian sungai, dan pengelolaan sanitasi. Modal sosial dapat memperkuat kepatuhan karena aturan dibuat dan diawasi bersama. Namun, masyarakat tidak dapat menanggung seluruh tanggung jawab. Pemerintah dan pihak terkait tetap memiliki kewajiban menyediakan infrastruktur, regulasi, data, pengawasan, dan dukungan teknis.

Keberlanjutan ekonomi memerlukan diversifikasi mata pencaharian dan peningkatan keamanan kerja. Aktivitas penyelaman artefak memiliki nilai ekonomi, tetapi pendapatannya tidak pasti dan risikonya tinggi. Penguatan modal sosial dapat diarahkan pada pembentukan kelompok, pelatihan keselamatan, pengelolaan pemasaran, pencatatan temuan, dan pengembangan wisata edukasi. Langkah tersebut perlu mengikuti ketentuan pelestarian cagar budaya dan perlindungan benda bersejarah.

Keberlanjutan sosial berkaitan dengan kemampuan masyarakat mempertahankan solidaritas sekaligus membuka hubungan dengan kelompok lain. Bonding social capital perlu dijaga untuk mempertahankan kohesi. Bridging social capital perlu diperluas untuk memperoleh pengetahuan dan peluang baru. Linking social capital perlu diperkuat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kebijakan.

Gambar 1.
Mekanisme modal sosial dalam mendukung keberlanjutan



Keberlanjutan budaya memerlukan dokumentasi pengetahuan lokal, sejarah komunitas, dan artefak. Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengembangan galeri komunitas atau pusat informasi lokal. Fasilitas tersebut dapat berfungsi sebagai ruang pendidikan, dokumentasi, dan promosi budaya. Pengelolaan harus dilakukan secara legal, akuntabel, dan melibatkan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang arkeologi serta pelestarian budaya.

3.8. Model Pengelolaan Sungai Berbasis Modal Sosial

Berdasarkan temuan, pengelolaan sumber daya sungai berbasis masyarakat dapat dibangun melalui lima komponen. Pertama, pembentukan forum komunitas yang mewakili warga, penyelam, perempuan, pemuda, tokoh lokal, dan pelaku ekonomi. Forum menjadi ruang identifikasi masalah, penyusunan prioritas, dan evaluasi. Kedua, pemetaan partisipatif yang mencakup lokasi aktivitas ekonomi, titik rawan genangan, sumber air, jalur sampah, lokasi penting budaya, dan kebutuhan infrastruktur. Ketiga,

penyusunan kesepakatan bersama mengenai pemanfaatan sungai, keselamatan, kebersihan, pelaporan masalah, dan perlindungan potensi budaya. Keempat, pengembangan kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, komunitas budaya, dan badan usaha. Kemitraan harus memiliki target, indikator, pembagian tugas, jadwal, serta mekanisme pelaporan. Kelima, evaluasi berkala berdasarkan perubahan kualitas lingkungan, akses layanan dasar, keselamatan kerja, partisipasi warga, dan manfaat ekonomi.

Model tersebut menempatkan modal sosial sebagai mekanisme penghubung. Kepercayaan memudahkan kerja sama. Norma memberi arah perilaku. Jaringan membuka akses terhadap sumber daya. Namun, modal sosial harus didukung tata kelola yang transparan. Tanpa transparansi, jaringan dapat menjadi eksklusif dan manfaat hanya diterima kelompok tertentu. Karena itu, keterwakilan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas perlu menjadi prinsip utama.

4. Penutup

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Kemaro memiliki modal sosial yang dapat menjadi dasar pengelolaan sumber daya sungai berbasis masyarakat. Modal sosial tersebut terlihat dalam kepercayaan antarwarga, norma timbal balik, pembagian wilayah kerja secara tidak tertulis, jaringan sosial, solidaritas, dan pengetahuan lokal mengenai sungai serta aktivitas penyelaman artefak. Unsur tersebut mendukung koordinasi, mengurangi konflik, memperkuat strategi penghidupan, dan mempertahankan identitas komunitas.

Bonding social capital relatif kuat karena masyarakat memiliki hubungan internal yang erat. Bridging social capital telah berkembang melalui hubungan dengan pembeli, pengunjung, mahasiswa, peneliti, dan komunitas lain. Linking social capital masih perlu diperkuat karena hubungan antara masyarakat dan institusi belum selalu menghasilkan program yang konsisten serta berkelanjutan. Dengan demikian, tantangan utama bukan ketiadaan modal sosial, melainkan belum optimalnya transformasi modal sosial menjadi kelembagaan kolaboratif.

Pengelolaan sungai yang mendukung keberlanjutan Pulau Kemaro perlu diwujudkan melalui forum komunitas, pemetaan partisipatif, kesepakatan lokal, pemantauan lingkungan, penyediaan air bersih, perbaikan infrastruktur, peningkatan keselamatan penyelam, serta pengembangan pelestarian artefak secara legal dan edukatif. Pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, komunitas budaya, dan badan usaha perlu bekerja melalui target yang terukur dan mekanisme akuntabilitas. Pendekatan ini dapat memperkuat keberlanjutan lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya tanpa menempatkan satu pihak sebagai satu-satunya penyebab maupun penanggung jawab.

Referensi

- Atmanto, D. (2024). *Model of river environmental management based on sustainable community social capital*. 040028. <https://doi.org/10.1063/5.0185176>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth edition). SAGE.
- Fatemi, M., Rezaei-Moghaddam, K., & Pourghasemi, H. R. (2021). Social networks' analysis of rural stakeholders in watershed management. *Environment, Development and Sustainability*, 23(12), 17535–17557. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01399-9>
- Massiri, S. D., Hamzari, H., Pribadi, H., Naharuddin, N., Malik, A., & Rauf, A. (2025). Community Social Capital in Poso Watershed Conservation, Central Sulawesi Province, Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 19(2), 180–192. <https://doi.org/10.22146/jik.v19i2.17664>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Panzarella, F., Turcanu, C., Abelshausen, B., & Cappuyns, V. (2023). Community capitals and (social) sustainability: Use and misuse of asset-based approaches in environmental management. *Journal of Environmental Management*, 329, 117122. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.117122>
- Paramitasari, A., Ibnu Agus Santosa, Eva Wirabuana, Muhammad Ali Sabbit Zamzani, Yunara, Dito Hastha Krisandy, Rifky Taufiq Fardian, & Reza Rahman Ramadhan. (2023). Implementation of Inclusive Empowerment-Based Corporate Social Responsibility (CSR) Programme: (Case Study of PT PLN Indonesia Power Kamojang POMU's Inclusive Mushroom Cultivation Program). *E-Proceeding Conference: Indonesia Social Responsibility Award*, 1(1), 10–20. <https://doi.org/10.55381/isra.v1i1.138>
- Pretty, J. (2003). Social Capital and the Collective Management of Resources. *Science*, 302(5652), 1912–1914. <https://doi.org/10.1126/science.1090847>
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. *Proceedings of the 2000 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work*, 357. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>
- Woolcock, M. (2001). The place of social capital in understanding social and economic outcomes. *Canadian Journal of Policy Research*, 2(1), 11–17.
